

NAMA : ZULFAA SALSABILLAH

NPM : 2313031038

KELAS : 2023B

TELAAH JURNAL

Kedua jurnal yang tersebut membahas aktiva tetap dari sudut yang berbeda namun saling melengkapi. Jurnal pertama karya Handayani (2013) yang diterbitkan di *Jurnal Bina Praja* mengkaji kelemahan pelaporan aktiva tetap di lingkungan pemerintah, sementara jurnal kedua karya Budiman, Pangemanan, dan Tangkuman (2014) yang diterbitkan di *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi* menganalisis perlakuan akuntansi aktiva tetap pada entitas swasta yaitu PT. Hasjrat Multifinance Manado. Keduanya menemukan persoalan mendasar yang serupa: ketidaksesuaian perlakuan akuntansi dengan standar yang berlaku, khususnya pada aspek pengakuan harga perolehan, perhitungan penyusutan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pada jurnal Handayani, temuan paling kritis adalah persoalan *valuation* dan *disclosure* aktiva tetap pemerintah. Permasalahan yang dihadapi pemerintah adalah masalah penilaian, di mana sebagian besar pemerintah masih berpedoman pada PP No. 24 Tahun 2005 sedangkan peraturan tersebut telah direvisi dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual, serta sistem SIMAK yang digunakan belum mencantumkan keterangan mengenai biaya penyusutan karena perhitungannya masih mengandalkan DJKN. Ini adalah kelemahan struktural yang serius karena penyusutan bukan sekadar formalitas pencatatan, melainkan representasi konsumsi manfaat ekonomis aset dari waktu ke waktu. Ketika penyusutan tidak dihitung secara mandiri oleh masing-masing instansi, nilai buku aktiva yang tersaji di neraca tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, sehingga keputusan penghapusan aset pun menjadi tidak berbasis data yang andal. Hal ini sejalan dengan pendapat Siregar (2004) yang dikutip dalam jurnal tersebut bahwa manajemen aset yang baik mensyaratkan informasi yang akurat tentang kondisi dan nilai aset sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pada jurnal Budiman dkk., temuan empirisnya tidak kalah signifikan meski berasal dari sektor swasta. Perlakuan akuntansi aktiva tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Manado belum sepenuhnya sesuai dengan SAK, karena perusahaan hanya mencatat perolehan aktiva tetap sebesar harga beli sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aktiva tetap tersebut dianggap sebagai biaya operasional, manajemen tidak pernah melakukan

pengukuran nilai aset, serta tidak pernah melakukan penghentian aktiva tetap meskipun terdapat aset yang umur ekonomisnya telah habis namun masih tercatat dalam daftar aktiva tetap perusahaan. Dari perspektif audit, ketiga kelemahan ini masing-masing berimplikasi langsung pada tiga asersi utama: *valuation* terganggu karena harga perolehan tidak lengkap, *existence* dipertanyakan karena aset yang sudah tidak dapat digunakan masih tercatat seolah masih bernilai, dan *completeness* terkompromikan karena penurunan nilai tidak pernah diakui.

Akar permasalahan persoalan aktiva tetap, baik di sektor pemerintah maupun swasta, bermuara pada dua hal yang saling terkait yaitu lemahnya pengendalian internal dan rendahnya pemahaman atas standar akuntansi yang berlaku. Budiman dkk. secara eksplisit merekomendasikan perlunya internal kontrol yang baik serta pemeriksaan daftar aktiva tetap minimal satu tahun sekali dengan membandingkan nilai fisik di lapangan dengan kartu aktiva tetap. Rekomendasi ini sejalan dengan konsep pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) yang menempatkan aktivitas pengendalian atas aset fisik sebagai komponen esensial dalam mencegah salah saji laporan keuangan.

Hal menarik untuk dielaborasi lebih jauh adalah perbedaan konteks antara keduanya. Pada sektor pemerintah, tantangan utamanya adalah sistemik: ketergantungan pada SIMAK yang belum terintegrasi dan belum mengakomodasi kebutuhan pemeriksa menjadi hambatan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan peningkatan kapasitas individu. Sementara di sektor swasta seperti PT. Hasjrat Multifinance, masalahnya lebih bersifat kebijakan manajemen yang belum konsisten merujuk pada PSAK 16. Implikasinya bagi auditor berbeda: pada entitas pemerintah auditor perlu memahami standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan keterbatasan sistem informasi yang ada, sedangkan pada entitas swasta auditor lebih berfokus pada pengujian konsistensi penerapan kebijakan akuntansi dan kewajaran estimasi umur manfaat serta nilai residu yang ditetapkan manajemen.

Secara keseluruhan, kedua jurnal ini memperkuat argumen bahwa audit aktiva tetap bukan sekadar prosedur teknis verifikasi fisik dan rekonsiliasi skedul penyusutan, melainkan juga evaluasi menyeluruh atas kualitas kebijakan akuntansi dan efektivitas sistem pengendalian internal yang menopang pelaporan aset tersebut.